

ABSTRAK

STRATEGI KOMUNIKASI AKTIVIS HIMPUNAN MAHASISWA SELUMA (HIMASEL) DALAM ADVOKASI KEBIJAKAN TAMBANG EMAS DI KABUPATEN SELUMA

Oleh:

Torik mandaresta

Dosen Pembimbing:

Riswanto, M.I.Kom

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rencana kebijakan pertambangan emas di Kabupaten Seluma yang menimbulkan kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan, hilangnya lahan pertanian, serta ancaman terhadap kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi komunikasi Aktivis Himpunan Mahasiswa Seluma (HIMASEL) dalam mengadvokasi kebijakan tambang emas di Kabupaten Seluma. Penelitian menggunakan Teori Strategi Komunikasi Onong Uchjana Effendy (2003) yang meliputi analisis khalayak, penyusunan pesan, penentuan metode, pemilihan media, dan peranan komunikator. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HIMASEL menerapkan strategi komunikasi secara terencana melalui edukasi masyarakat, penyusunan pesan persuasif, pemanfaatan media komunikasi, serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam advokasi penolakan tambang emas. Disimpulkan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan HIMASEL berjalan efektif dalam memperkuat gerakan advokasi dan mendorong partisipasi masyarakat terhadap isu perlindungan lingkungan.

Kata Kunci : strategi komunikasi, aktivis, advokasi, tambang emas.

ABSTRACT

COMMUNICATION STRATEGIES OF SELUMA STUDENT ASSOCIATION (HIMASEL) ACTIVISTS IN ADVOCACY REGARDING GOLD MINING POLICY IN SELUMA REGENCY

By:

Torik mandaresta

Supervisor:

Riswanto, M.I.Kom

*This research is motivated by a planned gold mining policy in Seluma Regency that raised concerns regarding environmental damage, the loss of agricultural land, and threats to the community's livelihood. This study aims to analyze the communication strategies employed by activists from the Seluma Student Association (HIMASEL) in advocating regarding the gold mining policy in Seluma Regency. The research utilizes Onong Uchjana Effendy's (2003) *Communication Strategy Theory*, which encompasses audience analysis, message formulation, method determination, media selection, and the role of the communicator. A qualitative method with a descriptive approach was employed, utilizing interviews, observation, and documentation involving informants selected through purposive sampling. The results indicate that HIMASEL implemented a planned communication strategy—involving public education, the formulation of persuasive messages, the use of communication media, and coordination with various stakeholders—thereby successfully increasing public awareness and participation in advocacy regarding the gold mining issue. It is concluded that the communication strategy implemented by HIMASEL was effective in strengthening the advocacy movement and encouraging public participation regarding environmental protection issues.*

Keywords: communication strategy, activism, advocacy, gold mining

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan sektor pertambangan global, perhatian terhadap mineral logam, termasuk emas, semakin meningkat baik dari sudut pandang ekonomi maupun dampak lingkungan. Di Indonesia, aktivitas pertambangan, terutama yang berhubungan dengan emas, baik yang berskala besar maupun kecil, tidak hanya menawarkan potensi ekonomi tetapi juga memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertambangan emas skala kecil di berbagai wilayah Indonesia telah terbukti menyebabkan masalah kesehatan di masyarakat serta merusak lingkungan, seperti pencemaran oleh merkuri, sianida, dan logam berat lainnya. (Fikri et al., 2023)

Pertambangan emas merupakan salah satu sektor yang berkembang pesat dalam industri ekstraktif di Indonesia, namun juga menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan yang signifikan. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta PT Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terdapat lebih dari 11.000 izin usaha pertambangan (IUP) yang aktif di Indonesia, di mana sekitar 6% di antaranya adalah tambang emas. Di berbagai daerah, rencana eksploitasi tambang emas sering kali memicu konflik sosial, terutama ketika kegiatan tersebut berpotensi merusak hutan atau tempat tinggal masyarakat. Situasi ini menggambarkan adanya ketegangan antara kepentingan ekonomi yang berfokus pada eksploitasi sumber daya dan kepentingan lingkungan yang menginginkan perlindungan ekosistem. Aktivitas pertambangan emas telah berlangsung selama beberapa tahun dan masih berlanjut hingga saat ini, mencerminkan dinamika gerakan sosial berbasis komunitas yang melibatkan organisasi lingkungan dan aktivis yang memperjuangkan keadilan ekologis. (Adamsya, 2025)

Dalam bidang pertambangan, komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan pemahaman, mencegah konflik, dan memperkuat kolaborasi antara pembuat kebijakan dan masyarakat. Ketegangan sering kali muncul akibat perbedaan kepentingan, di mana pemerintah dan perusahaan lebih fokus pada aspek ekonomi, regulasi, dan investasi, sementara masyarakat lebih menyoroti isu sosial, lingkungan, serta hak atas tanah. Ketika informasi tidak jelas dan masyarakat tidak dilibatkan sejak awal, potensi konflik meningkat akibat kesalahpahaman, kecurigaan, dan ketidakpuasan warga.

Komunikasi yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan dapat menjadi jembatan untuk mengatasi perbedaan tersebut melalui dialog konstruktif mengenai kebijakan, ganti rugi, dampak lingkungan, serta pengelolaan tambang yang lebih adil. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa dialog formal maupun informal antara perusahaan, pemerintah, dan komunitas dapat mengubah konflik menjadi proses partisipatif. Dengan demikian, masyarakat merasa didengar dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini dapat membantu membangun kepercayaan, memberikan legitimasi pada kebijakan, dan menciptakan hubungan sosial yang baik antara pihak-pihak yang terlibat seperti masyarakat. (Fitrianti et al., 2025)

Peran komunikasi tidak hanya terbatas pada penanganan konflik, tetapi juga mendukung keberlanjutan sosial dan lingkungan dalam jangka panjang. Komunikasi partisipatif melalui forum konsultasi, Diskusi Kelompok Terfokus (FGD), dan pertemuan rutin dapat menciptakan rasa keterlibatan serta tanggung jawab bersama terhadap keputusan yang diambil. Penelitian menunjukkan bahwa dialog dan interaksi yang dilakukan secara berkelanjutan mampu meningkatkan penerimaan sosial terhadap kegiatan pertambangan serta memperkuat pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi di sektor pertambangan tidak sekadar mengenai penyampaian informasi, melainkan juga merupakan proses strategis untuk membangun pemahaman bersama. (Utari & Muzni, 2019)

Menurut Himpunan Mahasiswa Seluma, di Indonesia terdapat lebih dari 650 sengketa lingkungan, dengan 60% diantaranya berkaitan dengan sektor pertambangan dan perkebunan. Sementara itu, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang ditunjukkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2024 mengalami penurunan dari 70,45 pada tahun 2021 menjadi 67,43 pada tahun 2025. Kondisi ini mencerminkan lemahnya pengelolaan lingkungan dan semakin besarnya ancaman terhadap hak-hak ekologis masyarakat. Selain isu lingkungan, kurangnya fasilitas bagi publik untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan juga memperburuk ketidaksetaraan. Ini menjadikan strategi komunikasi para aktivis sebagai alat penting dalam memperjuangkan hak komunitas lokal.

Dalam konteks wilayah seperti Seluma di Provinsi Bengkulu, rencana untuk mengembangkan aktivitas penambangan emas menimbulkan dilema antara manfaat ekonomi dan risiko terhadap lingkungan serta masyarakat. Sebagai ilustrasi, ada informasi yang menyebutkan bahwa di Seluma terdapat izin untuk eksplorasi emas yang mencakup sekitar 30.000 hektar, dengan potensi target sebanyak 1.743.000 ons emas dan 2.325.000 ons perak di salah satu lokasi sub prospek. Dilihat dari data demografis, Kabupaten Seluma menghadapi tantangan nyata dalam aspek pembangunan. Diperkirakan, pada tahun 2024, wilayah ini akan memiliki jumlah penduduk sekitar 217 sampai 507 jiwa. (Anggie firmansyah, 2024)

Rencana penambangan emas oleh PT. Energi Swa Dinamika Muda (ESDM) di daerah Bukit Sanggul telah menimbulkan kekhawatiran yang besar karena ukurannya dan posisinya yang berada di wilayah hutan lindung. Berdasarkan laporan penyelidikan dari media radar seluma, wilayah konsesi yang disebutkan berhubungan dengan aktivitas ini mencakup puluhan ribu hektare, dengan angka yang dilaporkan berkisar antara 24.800 hingga lebih dari 29.400, yang jika dilaksanakan bisa berdampak besar pada perubahan tutupan hutan alami. (Dinata, 2025)

PT Energi Swa Dinamika Muda (ESDMU) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan emas yang berada di Bengkulu, dengan 97% kepemilikan sahamnya dipegang oleh PT Aranka Resources Indonesia. Perusahaan ini memiliki hubungan dengan Dinmar Nadjamudin, dan salah satu anggota dewan komisaris utamanya adalah R. Makbul Padmanagara, yang pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. (“Suherman Apriadi,” 2023)

Dampak lingkungan yang diprediksi mencakup penebangan hutan besar-besaran, risiko terhadap sistem sungai, kehilangan lahan pertanian, dan ancaman terhadap 2.378 hektar areal persawahan yang dapat menyebabkan gagal panen di beberapa kecamatan di sekitarnya adalah dampak lingkungan yang diantisipasi. Penolakan publik muncul ketika status perizinan IUP eksplorasi diubah menjadi IUP operasi produksi pada tahun 2025. Rekomendasi untuk izin ditolak, menurut organisasi seperti HIMASEL, hal ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kehilangan mata pencaharian, dan dugaan maladministrasi selama proses perizinan. Sebaliknya, pendukung tambang menunjukkan keuntungan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan investasi. Diskusi ini menunjukkan ketidaksepakatan antara kepentingan pembangunan ekonomi jangka pendek dan upaya pelestarian fungsi ekosistem di lingkungan yang berharga dalam jangka panjang. (Suprayogi, 2025)

Pada tahun 2020, sekitar 18,56% dari populasi hidup dalam keadaan miskin, angka ini lebih tinggi daripada rata-rata provinsi yang hanya 15,03%. Di samping itu, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah masih tertinggal dan potensi di sektor pertambangan sering kali dilihat sebagai kesempatan untuk mempercepat pembangunan dan mengurangi kemiskinan. Dilaporkan bahwa investasi dalam sektor tambang di Seluma dipandang sebagai peluang terbaik untuk kemajuan dan kesejahteraan. Namun, penduduk lokal dan aktivis lingkungan di Seluma telah menyampaikan penolakan serta kritik terhadap rencana penambangan emas tersebut.

Sebagai contoh, terdapat gerakan masyarakat yang menolak rencana pertambangan emas di Bukit Sanggul, Kabupaten Seluma, dengan alasan dampak terhadap lingkungan serta kurangnya partisipasi yang memadai. Kritikan ini menunjukkan bahwa adanya gerakan sosial serta aktivis lingkungan memainkan peran penting dalam proses pengambilan kebijakan pertambangan di tingkat daerah. Dalam hal ini, hubungan antara masyarakat, aktivis lingkungan, dan pemerintah atau investor menjadi sangat penting, baik untuk menyampaikan harapan, membentuk opini publik, melakukan mobilisasi bersama, hingga mempengaruhi kebijakan tambang. (Syaputra, 2024)

Terdapat sejumlah studi sebelumnya yang telah menyoroti dampak lingkungan akibat aktivitas penambangan emas. Beberapa aspek utama termasuk pencemaran merkuri, kesehatan masyarakat, serta isu-isu yang berkaitan dengan regulasi perizinan pertambangan dan partisipasi masyarakat. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Meuti menunjukkan bahwa kegiatan penambangan emas skala kecil di Indonesia memberikan efek pencemaran lingkungan yang cukup besar. (Meutia, 2022)

Dalam menghadapi rencana pembukaan tambang emas oleh PT. Energi Swa Dinamika Muda di Kabupaten Seluma, para aktivis lingkungan serta komunitas setempat menciptakan berbagai taktik komunikasi yang ditujukan untuk menekan kebijakan tambang agar tetap menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Mereka memanfaatkan pendekatan advokasi untuk mengungkapkan penolakan terhadap izin tambang yang dianggap berisiko merusak ekosistem, sumber air, dan lahan pertanian milik warga. Mereka melaksanakan serangkaian aksi komunikasi, mulai dari pengumuman sikap, pengumpulan tanda tangan, forum diskusi publik, hingga kampanye untuk meningkatkan kesadaran dan membentuk opini publik yang mendukung perlindungan lingkungan.

Kabupaten Seluma, kondisi di daerah ini sangat penting untuk kajian ini, terutama dengan rencana pertambangan emas yang telah mendapatkan izin produksi dan akan mulai berlaku pada Januari 2025 di Bukit Sanggul, yang mencakup wilayah sekitar 24.800 hektar setelah hutan lindung mengalami perubahan status. Di lain pihak, kelompok masyarakat sipil telah menolak dan mengadakan diskusi publik terkait investasi tambang emas tersebut. Keadaan ini memberikan peluang empiris untuk mengkaji bagaimana aktivis lingkungan menggunakan strategi komunikasi untuk mempengaruhi atau menekan kebijakan tambang emas di kawasan tersebut. (Dinata, 2025)

Studi ini sangat berarti karena dapat memberikan pemahaman baru mengenai metode komunikasi yang digunakan oleh aktivis lingkungan dalam konteks kebijakan pertambangan emas. Pentingnya penelitian ini terletak pada fakta bahwa topik ini belum banyak diulas dalam karya-karya yang ada. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggali narasi, praktik di lapangan, serta makna yang dirasakan oleh aktivis dan masyarakat lokal. Diharapkan, penelitian ini dapat melengkapi studi-studi sebelumnya yang lebih fokus pada data kuantitatif atau perspektif yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekurangan dalam penelitian sebelumnya yang kurang memperhatikan aspek komunikasi dan hubungan antar aktor di tingkat lokal.

Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menemukan dan menganalisis metode komunikasi yang diterapkan oleh para aktivis Himasel dalam mengadvokasi kebijakan pertambangan emas di Kabupaten Seluma. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang komunikasi lingkungan, advokasi sosial, dan kebijakan publik dengan menyoroti peran aktivis, model komunikasi, serta proses perubahan kebijakan. Dari perspektif praktik, hasil dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan pihak-pihak yang terkait.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang yang diberikan sebelumnya maka dapat di rumuskan penelitian ini adalah: Bagaimana Strategi komunikasi aktivis Himpunan Mahasiswa Seluma dalam advokasi kebijakan tambang emas di Kabupaten Seluma.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Strategi komunikasi aktivis Himpunan Mahasiswa Seluma dalam advokasi kebijakan tambang emas di Kabupaten Seluma.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Temuan dari penelitian ini memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan ilmu komunikasi, khususnya di area komunikasi advokasi dan gerakan sosial terkait lingkungan. Penelitian ini mengeksplorasi berbagai cara berkomunikasi yang digunakan oleh aktivis lingkungan dalam mempengaruhi kebijakan yang berhubungan dengan penambangan emas di Kabupaten Seluma. Secara objektif, hasilnya menambah wawasan teori mengenai efektivitas pendekatan komunikasi advokasi, interaksi dengan masyarakat setempat, serta proses pembuatan keputusan dalam kerangka gerakan lingkungan di tingkat kebijakan lokal.

1.4.2 Manfaat Praktis

Temuan dari studi ini diharapkan bisa menjadi rujukan yang berguna bagi para praktisi, pembuat keputusan, dan masyarakat yang peduli dengan isu lingkungan. Tujuannya adalah untuk merancang dan mengimplementasikan strategi komunikasi advokasi yang lebih efektif dalam menolak kebijakan pertambangan emas di tingkat lokal. Selain itu, studi ini juga dapat memberikan panduan berbasis data tentang metode komunikasi kolaboratif yang dapat memperkuat partisipasi yang berkelanjutan.